



BKPSDM
KABUPATEN GRESIK

2026 RENCANA KERJA

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN GRESIK**



www.bkpsdm.gresikkab.go.id



[bkpsdmgresikkab](https://www.instagram.com/bkpsdmgresikkab)



bkpsdm@gresikkab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 245 Gresik, Jawa Timur, 61161
Telepon (031) 3952811, 3952823, 3952825-30 Faksimile (031) 3952744
Laman : bkpsdm.gresikkab.go.id Pos-el : bkpsdm@gresikkab.go.id

**PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN GRESIK
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG**

**RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA KABUPATEN GRESIK TAHUN 2026**

Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin keselarasan pembangunan secara efektif, efisien, dan bersasaran, diperlukan dokumen perencanaan pembangunan daerah;

b. Bahwa telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2025 tanggal 24 September 2025 tentang Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2026;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik tentang Rencana Kerja Tahun 2026.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 : tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029;
13. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2025 tanggal 24 September 2025 tentang Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2026;
14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN GRESIK TENTANG RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2026

Pasal 1

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik Tahun 2026 digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2026.

Pasal 2

Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BKPSDM KABUPATEN GRESIK
- BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- BAB V : PENUTUP
- LAMPIRAN : MATRIKS RENCANA STRATEGIS

Pasal 3

Uraian Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada pasal 1 terdapat dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Disahkan di Gresik

Pada Tanggal : 13 Oktober 2025

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN GRESIK**



AGUNG ENDRO D.S. UTOMO, S.STP., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP 19760305 199511 1 001

KATA PENGANTAR

D

engan mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT, Dokumen Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Gresik Tahun 2026 telah disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ranwal Renja BKPSDM Kabupaten Gresik Tahun 2026 ini merupakan Rancangan awal yang nantinya akan digunakan menjadi dasar pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2026.

Ranwal Renja BKPSDM Kabupaten Gresik Tahun 2026 ini memuat Kebijakan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan berdasarkan evaluasi pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan di tahun lalu serta mengakomodir masukan dari para *stakeholder*.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam penyusunan Dokumen Ranwal Renja BKPSDM Kabupaten Gresik Tahun 2026.

Akhir kata, besar harapan kami semoga Ranwal Renja BKPSDM Kabupaten Gresik Tahun 2026 ini dapat memberikan manfaat dalam mendukung dan mensukseskan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Gresik.

Gresik, 13 Oktober 2025

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN GRESIK**



AGUNG ENDRO D.S. UTOMO, S.STP., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP 19760305 199511 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BKPSDM KABUPATEN GRESIK TAHUN 2024	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BKPSDM Tahun 2024 dan Capaian Renstra BKPSDM Tahun 2025	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	24
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	26
2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	26
2.3.2 Identifikasi Permasalahan dan Hambatan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan.....	26
2.3.3 Dampak terhadap Visi dan Misi Bupati dan Terhadap Capaian Program Nasional.....	27
2.3.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD	28
2.3.5 Rekomendasi dan Catatan Strategis dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun yang direncanakan	30
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	31
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	38
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	40
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	40
3.2 Tujuan dan Sasaran Ranwal Renja Perangkat Daerah	46
3.2.1 Tujuan	46
3.2.2 Sasaran.....	47
3.3 Program dan Kegiatan	49

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ..60

BAB V PENUTUP64

5.1	Kaidah-Kaidah Pelaksanaan	64
5.2	Rencana Tindak Lanjut	64



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2024 Kabupaten Gresik	11
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	25
Tabel 2.3 Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Gresik.....	32
Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Gresik	39
Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027	53
Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025 Kabupaten Gresik	61



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk Periode 1 (satu) Tahun yang memuat kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam rangka mewujudkan sasaran strategis dan tujuan. Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Gresik Tahun 2026 merupakan kelanjutan dari Renja BKPSDM Kabupaten Gresik Tahun 2025 yang memuat kebijakan pembangunan, sasaran, serta uraian program, kegiatan serta sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026 guna mencapai sasaran strategis dan mendukung tercapainya tujuan Pemerintah Kabupaten Gresik.

Penyusunan Ranwal Renja BKPSDM Tahun 2026 didasarkan pada keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan pembangunan yaitu Dokumen Rencana Strategis (Renstra) BKPSDM Tahun 2021–2026 sesuai dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2021–2026 dan Peraturan Kepala BKPSDM Kabupaten Gresik Nomor 28 Tahun 2022 tentang Rencana Sasaran Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik Tahun 2021–2026.

Proses penyusunan Ranwal Renja BKPSDM Kabupaten Gresik Tahun 2026 didasarkan pada kebutuhan, penjangkaran aspirasi (*bottom up*) melalui musyawarah perencanaan pembangunan melalui Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum PD) yang melibatkan perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik serta *stakeholders* terkait. Dalam prosesnya, penyusunan Ranwal Renja BKPSDM Kabupaten

Gresik mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Ranwal Renja BKPSDM Kabupaten Gresik dapat dikerjakan secara simultan atau paralel dengan penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting perangkat daerah, evaluasi pelaksanaan Renja BKPSDM Kabupaten Gresik tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra BKPSDM Kabupaten Gresik Tahun 2021–2016.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Ranwal Renja BKPSDM Kabupaten Gresik Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2013;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Bupati Gresik Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik;
18. Keputusan Bupati Gresik Nomor 050/57/HK/437.12/2024 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik Tahun 2026;
19. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik Nomor 28 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Ranwal Renja Tahun 2026 adalah sebagai dokumen resmi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada lingkup BKPSDM Kabupaten Gresik Tahun 2026 serta untuk memberikan gambaran perencanaan tahunan secara resmi dalam rangka pelaksanaan program kerja BKPSDM juga sebagai implementasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Gresik dan Renstra BKPSDM Kabupaten Gresik Tahun 2021–2026.

Adapun Tujuan penyusunan Ranwal Renja BKPSDM Kabupaten Gresik Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pelayanan perangkat daerah;
2. Pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan;
3. Penyusunan rencana kerja anggaran perangkat daerah.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BKPSDM KABUPATEN GRESIK TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BKPSDM Tahun 2024 dan Capaian Renstra BKPSDM Tahun 2024

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan capaian Renstra Perangkat Daerah ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan, sub kegiatan, serta mengidentifikasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Evaluasi didasarkan atas laporan hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024, laporan pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah, dan perkiraan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun berjalan yang baru disahkan.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra BKPSDM Kabupaten Gresik Tahun 2024, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Realisasi Program atau Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan:
Kegiatan berjalan semua meskipun terjadi efisiensi anggaran, khususnya untuk pelaksanaan Pendidikan, pelatihan dan pengembangan SDM yang banyak mengalami pengurangan peserta.
2. Realisasi Program atau Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- c. Kegiatan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- f. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
 - Sub Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN

- Sub Kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - g. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
 - h. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN
 - Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
 - i. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai
 - Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
 - j. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
 - k. Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya atau terpenuhinya, target kinerja program atau kegiatan

Pada pelaksanaan Perubahan APBD Tahun 2024, BKPSDM Kabupaten Gresik mendapatkan arahan efisiensi kegiatan disebabkan keadaan pendapatan daerah yang difisit, terdapat beberapa kegiatan

yang akhirnya ditunda untuk pelaksanaannya. Maka dari itu, penyerapan anggaran BKPSDM pada tahun 2024 hanya 82,72%. Beberapa kegiatan khususnya pengiriman Pendidikan, pelatihan dan pengembangan SDM ditunda pelaksanaannya. Pelaksanaan bintek purna tugas juga mengalami penundaan.

Namun , capain kinerja BKPSDM Tahun 2024 tetap mencapai kinerja sesuai harapan sesuai dengan tabel berikut ini :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KETERANGAN
1	Meningkatkan tata kelola manajemen SDM aparatur yang profesional dan berbasis sistem merit dalam memberikan pelayanan kepegawaian yang berkualitas	1. Indeks Profesionalitas ASN	89,8	89,74	98.90%	Sumber Data: Aplikasi SIASN
		2. Indeks Sistem Merit	300	310,5	103,5%	Sumber Data : Keputusan Kepala BKN Nomor 511 Tahun 2024

Adapun analisis faktor keberhasilan disebabkan ditunjukkan oleh tabel berikut ini :

NO	DIMENSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
INDEKS PROFESIONALITAS ASN			
1	Kompetensi	- Kualitas data pengembangan kompetensi pegawai yang telah direkon tidak akurat - ASN yang sudah mengikuti Diklat 20 JP yang tidak mendapatkan nilai kinerja maksimal (Sangat Baik) tidak bisa mendapatkan nilai maksimal	- Mereplikasi program Webinar “ASN Belajar” dari BPSDM Prov. Jatim dengan mewajibkan JFT dan JFU yang jabatannya sesuai dengan tema webinar untuk mengikuti webinar tersebut - Informasi Webinar “ASN Belajar” disebar luaskan kepada seluruh ASN melalui WA Gateway maupun Sosial Media yang dimiliki BKPSDM - Penguatan Impelemntasi GAPURA E-Learning BKPSDM - Peningkatan Koordinasi dan Motivasi kepada OPD agar mampu mencapai target kinerja organisasi

2	Kinerja	• Pegawai OPD yang mendapatkan insentif tambahan diluar TPP banyak yang tidak menyusun SKP Tahunan • Adanya Kebijakan terkait Pola distribusi kinerja yang menyebabkan jumlah ASN untuk mendapatkan nilai Sangat Baik terbatas tergantung capaian kinerja organisasi	• Membuat Surat Edaran kepada seluruh OPD untuk Menyusun SKP 2024 di awal tahun 2025 • Peningkatan Koordinasi dan Motivasi kepada OPD agar mampu mencapai target kinerja organisasi
INDEKS SISTEM MERIT			
1	Pengembangan Karir	• Belum melakukan penyesuaian nomenklatur jabatan pelaksana dan menyusun standar kompetensi jabatan tersebut • Belum menyusun pembobotan potensi dan kinerja secara rinci, lalu diaplikasikan dalam Manajemen Talenta • Belum menyusun rencana suksesi • Belum menyusun strategi pengembangan kompetensi dan kinerja jangka Panjang • Belum melaksanakan program diklat sesuai dengan kesenjangan kompetensi dan kinerja pegawai • Belum melaksanakan praktik kerja/pertukaran pegawai • Pedoman sudah disusun namun belum dilaksanakan	Menyusun dokumen yang diminta
2	Promosi dan Mutasi	• Pelaksanaan pola karir berdasarkan manajemen talenta dan rencana suksesi • Pengisian jabatan administrator dan pengawas belum dilakukan dengan menggunakan metode	Melaksanakan pola karir
3	Manajemen Kinerja	• Penyelenggaraan diklat dan workshop belum didasarkan pada permasalahan kinerja yang telah dianalisis	Melakukan koordinasi untuk pemenuhan dokumen tersebut
4	Perlindungan dan Pelayanan	• Belum menyusun regulasi sebagai payung hukum terkait dengan program tali asih pensiun dan santunan kematian • Pemberian bantuan hukum belum dilaksanakan	Menyusun regulasi untuk ditetapkan

4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra perangkat daerah

Berdasarkan pencapaian di atas diketahui bahwa capaian kinerja BKPSDM sebenarnya sudah sesuai target. Namun adanya eifisiensi menyebabkan beberapa kegiatan khususnya pelaksanaan diklat harus dikurangi, ini menyebabkan nilai IP ASN kabupan Gresik juga tidak bisa maksimal, disamping itu hal ini menyebabkan banyak pegawai yang tidak bisa meningkatkan kompetensi pegawai.

5. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2024 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal. BKPSDM Kabupaten Gresik selalu melakukan langkah yang konstruktif dan kongkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan di masa mendatang. Kekurangan yang terjadi selama Tahun 2024 menjadi catatan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja pada tahun mendatang. Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan yang belum berhasil berkinerja 100% akan dievaluasi, sehingga seluruh Kegiatan dan Sub Kegiatan akan tercapai 100% pada tahun berikutnya.

Adapun Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2 .1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2025 Kabupaten Gresik

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program / Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d. Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s.d. Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5 03 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota		100%	100%						
5 03 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	a. Jumlah Dokumen Renja dan SOP b. Jumlah dokumen perencanaan PD	a. 120 Buah b. 24 Dok	120 Buah	12 Dok	12 Dok	100%	6 Dok	a. 120 Buah b. 18 Dok	75%
5 03 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	a. Jumlah Laporan SKPD (LKjIP, LPPD, Laporan Monev APBD dan SAKIP) b. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	a. 55 Buah b. 48 Lap	55 Buah	24 Laporan	24 Laporan	100%	12 Laporan	a. 55 Buah b. 36 Lap	75%
5 03 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	a. Jumlah Pembayaran Gaji Pegawai dan TPP selama setahun b. Jumlah Orang yang menerima gaji	a. 24 Bulan b. 220 Pegawai	24 Bulan	55 Pegawai	55 Pegawai	100%	55 Pegawai	a. 24 Bulan b. 55 Pegawai	100%

Kode	Urusan/Bidang Ururan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program / Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d. Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s.d. Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5 03 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	a. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun b. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	a. 24 Lap b. 48 Lap	24 Lap	24 Lap	24 Lap	100%	12 Lap	a. 24 Lap b. 36 Lap	75%
5 03 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Seme steran SKPD	a. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran Tahun yang tersusun b. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /	60 Lap						60 Lap	100%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program / Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d. Tahun 2025	
										Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s.d. Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						Triwulan Semesteran SKPD									
5	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	a. Jumlah ATK b. Jumlah Peralatan Kantor c. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	a. 80 Jenis b. 56 Unit c. 12 Paket	a. 80 Jenis b. 56 Unit	3 Paket	3 Paket	100%	3 Paket	a. 80 Jenis b. 56 Unit c. 6 Paket	50%	
5	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	a. Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman b. Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	a. 2.754 Porsi b. 100 Paket	2.754 Porsi	25 Paket	25 Paket	100%	25 Paket	a. 2.754 Porsi b. 50 Paket	50%	
5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	a. Jumlah Barang Cetakan yang tersedian selama setahun b. Jumlah Paket Barang Cetakan yang tersedia selama setahun	a.38 Jenis b.49 Paket	38 Jenis	13 Paket	13 Paket	100%	13 Paket	a. 38 Jenis b. 26 Paket	53%	
5	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan- undangan	Jumlah Surat Kabar yang trsedia selama setahun	a.6 Jenis b.12 Dok	6 Jenis	9 Dokumen	9 Dokumen	100%	3 Dokumen	a. 6 Jenis b. 12 Dok	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program / Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d. Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s.d. Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5 03 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	a. Jumlah Perjalanan Dinas yang terlaksana selama setahun b. Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	a. 210 Kali b. 320 Lap	210 Kali	113 Laporan	113 Laporan	100%	80 Laporan	a. 210 Kali b. 193 Lap	60%
5 03 01 2.06 12	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dok	-	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	2 Dok	67%
5 03 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	a. Jumlah Tenaga Non ASN yang dibayar selama setahun b. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	a. 8 Org b. 16 Lap	8 Org	8 Laporan	8 Laporan	100%	4 Laporan	a. 8 Org b. 12 Laporan	75%
5 03 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	a. Jumlah Kendaraan Jabatan / Dinas / Operasional pada BKPSDM yang terpelihara selama setahun	a. 14 Unit b. 44 Kendaraa n	14 Unit	22 Kendaraan	22 Kendaraan	100%	11 Kendaraan	a. 14 Unit b. 33 Kendaraan	75%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program / Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d. Tahun 2025	
									Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s.d. Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	b. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya								
5	03	01	2.09	02	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	a. Jumlah peralatan dan mesin kantor yang terpelihara selama setahun b. Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	566 Kali	228 Kali	153 Kali	153 Kali	100%	90 Kali	471 Kali	83%
5	03	02			Program Kepegawaian Daerah		100%	100%						
5	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	a. Jumlah Dokumen bezzeting b. Jumlah Pendaftar CPNS dan PPPK c. Jumlah penerima SK CPNS dan PPPK d. Jumlah peserta bintal CPNS dan PPPK	a. 120 Dok b. 25.000 Org c. 1.537 Org d. 1.537 Org e. 500 Org f. 12 Dok	a. 120 Dok b. 2.102 Org c. 1.537 Org d. 1.537 Org e. 500 Org f. 3 Dok	3 Dok	3 Dok	100%	3 Dok	a. 120 Dok b. 2.102 Org c. 1.537 Org d. 1.537 Org e. 500 Org f. 9 Dok	75%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program / Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d. Tahun 2025	
										Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s.d. Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						e. Jumlah peserta ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah f. Jumlah dokumen hasil penyusunan kebutuhan, jenis, dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengaadaan ASN									
5	03	02	2.01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	a. Fasilitas OPD yang dimonitoring b. Jumlah ASN yang dibina minat bakat c. Jumlah ASN yang mengikuti Pembinaan Mental dan Rohani d. Jumlah Penyelenggara HUT KORPRI e. Jumlah Lembaga Profesi ASN yang difasilitasi	a. 104 OPD b. 60 ASN c. 50 ASN d. 2 Kali e. 4 Lembag a	a. 104 OPD b. 60 ASN c. 50 ASN d. 2 Kali e. 2 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	100%	1 Lembaga	a. 104 OPD b. 60 ASN c. 50 ASN d. 2 Kali e. 3 Lembaga	75%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program / Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d. Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s.d. Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5 03 02 2.01 10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	a. Jumlah Pemeliharaan Aplikasi b. Jumlah Kegiatan Verifikasi Data Kepegawaian c. Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	a. 4 Aplikasi b. 4 Kali c. 8 Dok	a. 4 Aplikasi b. 4 Kali c. 2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	a. 4 Aplikasi b. 4 Kali c. 6 Dokumen	75%
5 03 02 2.02 01	Pengelolaan Mutasi ASN	a. Jumlah SK Pengangkatan PPPK, Jumlah SK Pengangkatan PNS, Jumlah Peserta Tes Kesehatan CPNS, dan Jumlah SK Kenaikan b. Jumlah Berita Acara Rapat Tim Penilai Kinerja PNS c. Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi, Jabatan	a. 2.750 Org b. 50 Kali c. 16 Dok	a. 2.750 Org b. 50 Kali	8 Dokumen	8 Dokumen	100%	4 Dokumen	a. 1.537 Org b. 28 Kali c. 12 Dokumen	75%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program / Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d. Tahun 2025	
										Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s.d. Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						Pimpinan Tinggi, Jabatan administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah									
5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	a. Jumlah ASN yang menerima SK Kenaikan Pangkat, Jumlah ASN yang menerima SK Pangkat Pengabdian/ SK Pensiun, Jumlah ASN yang menerima SK Kenaikan Gaji Berkala, Jumlah ASN yang bisa menghitung angka kredit. b. Jumlah pengelolaan kenaikan pangkat	a. 12.769 Org b. 112 Kali	12.769 Org	56 Kali	56 Kali	100%	28 Kali	a. 12.769 Org b. 84 Kali	75%	
5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Promosi ASN	a. Jumlah hasil uji kompetensi PNS b. Jumlah JPT Pratama yang lowong	a. 422 Org b. 13 Jabatan c. 12 Kali d. 19 Dok	a. 422 Org b. 13 Jabatan c. 12 Kali	8 Dokumen	8 Dokumen	100%	5 Dokumen	a. 422 Org b. 13 Jabatan c. 12 Kali d. 13 Dokumen	68%	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program / Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d. Tahun 2025	
										Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s.d. Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						c. Jumlah Pelantikan Pejabat Struktural & Fungsional d. Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN									
5	03	02	2.03	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	a. Jumlah Peserta Uji Kesehatan bagi Aparatur maupun PNS sakit menahun b. Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya	a. 350 Org b. 20 Org	350 Org	10 Org	10 Org	100%	5 Org	a. 106 Org b. 15 Org	75%	
5	03	02	2.03	02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah dokumen pengelolaan assessment center	4 Dok	-	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	2 Dok	50%	
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Pendidikan lanjutan	43 Org	-	35 Org	35 Org	100%		35 Org	81%	
5	03	02	2.03	13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN fungsional yang dibina	21 Org	-	17 Org	17 Org	100%	-	17 Org	81%	
5	03	02	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	a. Jumlah ASN yang memiliki penilaian kinerja baik b. Jumlah Dokumen Hasil	a. 250 Org b. 12 Dok	250 Org	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	3 Dokumen	a. 250 Org b. 9 Dokumen	75%	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program / Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d. Tahun 2025	
									Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s.d. Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Sumber Daya Manusia									
5	04	02	2.01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	a. Jumlah Peserta Diklat Teknis b. Jumlah kebijakan teknis dan rencana pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren, PD penunjang, dan urusan pemerintahaan umum yang disusun	c. 580 Org d. 8 Kebijakan	580 Org	4 Kebijakan	4 Kebijakan	100%	2 Kebijakan	a. 580 Org b. 6 Kebijakan	75%
5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	a. Jumlah peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas, jumlah pelatihan kepemimpinan administrator, dan jumlah pelatihan	a. 90 Org b. 800 Org c. 100 Org d. 36 Laporan	a. 90 Org b. 800 Org c. 100 Org	12 Laporan	12 Laporan	100%	6 Laporan	a. 90 Org b. 800 Org c. 100 Org d. 18 Laporan	50%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program / Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d. Tahun 2025	
									Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s.d. Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						kepemimpinan nasional b. Jumlah peserta Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS c. Jumlah peserta Diklat Calon Kepala Sekolah d. Jumlah Laporan Hasil Penyelenggara n Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan								
5	04	02	2.02	08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga	Jumlah ASN yang Tugas Belajar Selama setahun	4 Org	4 Org						100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program / Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d. Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s.d. Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan								

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sasaran strategis BKPSDM Kabupaten Gresik sebagaimana yang telah di targetkan pada Renstra BKPSDM Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 adalah Meningkatkan Tata Kelola Manajemen SDM Aparatur yang Professional dan Berbasis Sistem Merit dalam Memberikan Pelayanan Kepegawaian yang Berkualitas dan terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu Indeks Profesionalitas ASN dan Indeks Sistem Merit. Adapun analisis pencapaian kinerja pelayanan BKPSDM Tahun 2024 adalah sebagai berikut:



Tabel 2 .2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra						Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Profesionalitas ASN	-	-	50	55	57	60	62	65	89,74	90	92		Pada Tahun 2026 menyesuaikan dengan renstra baru nantinya
2	Indeks Sistem Merit	-	-	200 (Kurang Baik)	250 (Baik)	275 (Baik)	300 (Baik)	324 (Baik)	335 (Sangat Baik)	300,5	305	325		

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

BKPSDM adalah unsur penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam rangka pelayanan kinerja BKPSDM Kabupaten Gresik pada Ranwal Renja Tahun 2026, aparatur di lingkungan BKPSDM Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan : 1 orang
2. Sekretaris Badan : 1 orang
3. Kepala Bidang : 4 orang
4. Kepala Sub Bagian : 2 orang
5. Fungsional Tertentu : 10 orang
6. Fungsional Umum : 32 orang

2.3.2 Identifikasi Permasalahan dan Hambatan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Adapun permasalahan dalam pelayanan BKPSDM Kabupaten Gresik diantaranya:

1. Kualitas data kepegawaian pada Aplikasi SIMPEG yang belum mutakhir;
2. Pelaksanaan Manajemen SDM berbasis Sistem Merit masih belum optimal;
3. Belum terlaksananya pengembangan karier menggunakan sistem manajemen talenta;
4. Pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN belum disusun berdasarkan analisis kesenjangan kompetensi; dan
5. Masih sedikitnya pelaksanaan Diklat ASN dikarenakan keterbatasan anggaran.

Sedangkan faktor-faktor penghambat:

1. Kapasitas, kualitas, kuantitas, dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi belum optimal;
2. Adanya perubahan Kebijakan Nasional, sehingga memerlukan penyesuaian dalam pelaksanaannya;
3. Terbatasnya pagu anggaran untuk pelaksanaan diklat; dan
4. Belum tersedianya sarana dan prasarana (Gedung Diklat Mandiri).

2.3.3 Dampak terhadap Visi dan Misi Bupati dan Terhadap Capaian Program Nasional

BKPSDM Kabupaten Gresik mendukung pernyataan Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagai arah pembangunan selama periode Tahun 2021-2026 sebagaimana tertuang pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Gresik yaitu: **Mewujudkan Gresik Baru yang Lebih Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Kharimah.**

Terkait dengan Visi dan Misi Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, BKPSDM Kabupaten Gresik dalam penyusunan Renstra berdasarkan Misi ke-1 yakni: ***“Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif”***

Komitmen mengenai tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang inovatif dan kolaboratif, selaras dengan tujuan besar Reformasi Birokrasi di Indonesia. Prinsip tata kelola yang transparan dan akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang inovatif dan kolaboratif mensyaratkan bahwa pemerintah tidak hadir dan bekerja sendirian dalam menjalankan proses pembangunan, namun menjalankan tata kelola pemerintahan dimana pemerintah menempatkan tiga pilar *good governance* yaitu *civil society* sebagai aktor-aktor strategis pembangunan, wirausahawan untuk menciptakan tatanan ekonomi yang terbuka dan pemerintahan yang transparan, responsif dan akuntabel.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut harus didukung oleh Sumber Daya Manusia Aparatur yang profesional, disiplin dan

berakuntabilitas kepada mitra kerja (*stakeholders*), sampai kepada adanya pengawasan yang proporsional serta menghasilkan pelayanan prima. BKPSDM melalui program, kegiatan dan sub kegiatan berusaha melakukan kinerja manajemen SDM aparatur sebaik-baiknya untuk menghasilkan SDM aparatur yang professional dan akuntabel sehingga mampu mendukung terwujudnya misi tersebut.

Kinerja BKPSDM menjadi salah satu poin dalam 8 area perubahan pada pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dalam hal ini menjadi indikator keberhasilan tujuan pembangunan Kabupaten Gresik. Indeks Reformasi Birokrasi yang didalamnya terdapat penataan Sumber Daya Manusia juga merupakan salah satu poin penting dalam pelaksanaan pembangunan Nasional.

2.3.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan BKPSDM, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada, tujuannya untuk mempertajam kebijakan pelayanan BKPSDM untuk mendukung pencapaian target dan sasaran RPJMD.

1. Tantangan

- a. Peningkatan pelayanan informasi kepegawaian yang cepat, murah, dan mudah diakses;
- b. Peningkatan Pengembangan Kompetensi ASN;
- c. Penerapan Manajemen Talenta ASN; dan
- d. Penerapan Konsep *Smart* ASN untuk mewujudkan *World Class Government*.

2. Peluang

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara;

- b. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- c. Telah tersedianya sistem informasi kepegawaian yang berbasis digital sehingga mempermudah pelayanan kepegawaian; dan
- d. Telah tersedianya Unit Pembantu urusan Kepegawaian pada masing-masing perangkat daerah.

Melalui metode analisis SWOT, akan diidentifikasi hal-hal yang mempengaruhi *Strength* (Kekuatan), *Weaknesses* (Kelemahan), *Opportunity* (Peluang), dan *Threat* (Ancaman) pada penyelenggaraan pelayanan di BKPSDM Kabupaten Gresik. Adapun hasil analisis menggunakan metode SWOT sebagai berikut:

1. *Strength* (Kekuatan)

- a. Struktur organisasi dan tupoksi yang jelas;
- b. Dasar hukum yang jelas atas pelaksanaan kegiatan;
- c. Komitmen Atasan yang didukung oleh seluruh pegawai untuk terus melakukan perbaikan; dan
- d. Koordinasi yang baik antar Bidang dan *Stakeholders*.

2. *Weaknesses* (Kelemahan)

- a. Kualitas data kepegawaian pada Aplikasi SIMPEG yang belum mutakhir;
- b. Pelaksanaan Manajemen SDM berbasis Sistem Merit masih belum optimal;
- c. Belum terlaksananya pengembangan karier menggunakan sistem manajemen talenta; dan
- d. Pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN bergantung pada instansi penyelenggara.

3. *Opportunity* (Peluang)

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara;

- b. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - c. Telah tersedianya sistem informasi kepegawaian yang berbasis digital sehingga mempermudah pelayanan kepegawaian; dan
 - d. Telah tersedianya Unit Pembantu urusan Kepegawaian pada masing-masing perangkat daerah.
4. *Threat* (Ancaman)
- a. Kesenjangan kompetensi antara yang dibutuhkan dan yang tersedia;
 - b. Terbatasnya pagu anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan diklat; dan
 - c. Belum tersedianya sarana dan prasarana (Gedung Diklat Mandiri).

2.3.5 Rekomendasi dan Catatan Strategis dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun yang direncanakan

Rekomendasi berkenaan dengan peran BKPSDM Kabupaten Gresik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam memberikan pelayanan dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dan setelah dikaitkan dengan Visi dan Misi Bupati Gresik dan Telaahan Kebijakan Nasional, dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Pemutakhiran data kepegawaian pada Aplikasi SIMPEG secara berkala;
2. Pemenuhan formasi kebutuhan pegawai melalui pengadaan CPNS dan PPPK;
3. Peningkatan kompetensi ASN melalui penyelenggaraan diklat, bimtek, *workshop*, atau yang lain;
4. Pelaksanaan pelayanan kepegawaian berbasis elektornik; dan
5. Pelaksanaan sistem merit dan manajemen talenta.

Berdasarkan rekomendasi di atas, maka strategi BKPSDM dalam mewujudkan rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pendidikan dan pelatihan serta uji kompetensi bagi ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik termasuk jabatan fungsional akibat penyetaraan jabatan;
2. Melaksanakan manajemen SDM aparatur berbasis sistem merit dan manajemen talenta;
3. Optimalisasi pelaksanaan GREAT ASN dengan cara melakukan sosialisasi pembaruan data kepegawaian pada Aplikasi SIMPEG bagi seluruh pegawai;
4. Meningkatkan kinerja ASN melalui penerapan *Reward and Punishment*; dan
5. Meningkatkan pelayanan kepegawaian berbasis teknologi dan pemetaan jabatan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Ranwal Renja Tahun 2026 merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Renjaa Tahun 2026 yang disusun ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya yang merupakan tolok ukur keberhasilan dari tugas pokok dan fungsi BKPSDM Kabupaten Gresik. Disamping itu juga, Dokumen Ranwal Renja Tahun 2026 yang disusun ini juga memuat informasi tentang program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, dan rencana capaiannya.

Melalui Dokumen Ranwal Renja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh BKPSDM Kabupaten Gresik. Program, kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2026 merupakan Ranwal Renja yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026 dan telah dimuat dalam RKPD Tahun 2026. Adapun *review* terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2 .3 Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Gresik

No	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target 2026	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target 2026	Kebutuhan Dana	
	URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				23.142.823.304	URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				21.713.257.571	
	KEPEGAWAIAN				14.591.625.304	KEPEGAWAIAN				15.048.179.745	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA				7.125.449.994	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA				9.686.362.385	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				177.939.414	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				254.494.599	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gresik	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 Dok	57.784.911	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gresik	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 Dok	24.303.343	
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gresik	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	12 Lap	120.154.503	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gresik	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	12 Lap	230.191.256	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.506.450.978	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7.086.892.256	
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gresik	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	55 Pegawai	5.488.671.265	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gresik	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	55 Pegawai	7.080.978.750	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Gresik	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	12 Lap	8.000.896	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Gresik	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	12 Lap	5.913.506	
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Kab. Gresik	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD	36 Lap	9.778.817	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Kab. Gresik	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD	36 Lap	0	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				974.334.873	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.811.016.930	
6	Penyediaan Peralatan dan	Kab. Gresik	Jumlah paket peralatan dan	3 Paket	294.499.743	Penyediaan Peralatan dan	Kab. Gresik	Jumlah paket peralatan dan	3 Paket	299.786.165	

No	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target 2026	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target 2026	Kebutuhan Dana	
	Perlengkapan Kantor		perlengkapan kantor			Perlengkapan Kantor		perlengkapan kantor			
7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Gresik	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	25 Paket	93.336.383	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Gresik	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	25 Paket	84.210.100	
8	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Gresik	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	13 Paket	160.019.907	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Gresik	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	13 Paket	146.064.500	
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan	Kab. Gresik	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3 Dok	9.778.994	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan	Kab. Gresik	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3 Dok	13.608.000	
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gresik	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	80 Lap	266.699.846	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gresik	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	80 Lap	250.000.000	
11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Gresik	Jumlah dokumen atas pelaksanaan SPBE	1 Dok	150.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem PBE pada SKPD	Kab. Gresik	Jumlah dokumen atas pelaksanaan SPBE	1 Dok	1.017.348.165	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				160.019.907	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				258.740.000	
12	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Gresik	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang dilaksanakan	4 Lap	160.019.907	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Gresik	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang dilaksanakan	4 Lap	258.740.000	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				306.704.822	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				275.218.600	

No	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target 2026	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target 2026	Kebutuhan Dana	
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Gresik	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	11 Kendaraan	155.574.910	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Gresik	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	11 Kendaraan	256.918.600	
14	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Gresik	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	90 Kali	151.129.912	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Gresik	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	90 Kali	18.300.000	
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				7.466.175.310	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				5.361.817.360	
	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				1.970.517.040	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				1.277.748.831	
15	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kab. Gresik	Jumlah dokumen hasil penyusunan rencana kebutuhan, jenis, dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	3 Dok	1.434.716.066	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kab. Gresik	Jumlah dokumen hasil penyusunan rencana kebutuhan, jenis, dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	3 Dok	920.066.216	
16	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Kab. Gresik	Jumlah Lembaga profesi ASN yang difasilitasi	1 Lembaga	314.491.876	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Kab. Gresik	Jumlah Lembaga profesi ASN yang difasilitasi	1 Lembaga	110.561.791	
17	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Gresik	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kepegawaian	2 Dok	221.309.098	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Gresik	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kepegawaian	2 Dok	247.120.824	
	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN				2.303.643.284	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN				1.040.997.034	
18	Pengelolaan Mutasi ASN	Kab. Gresik	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan mutasi jabatan pimpinan tinggi, mutasi jabatan administrasi, mutasi jabatan	4 Dok	425.146.425	Pengelolaan Mutasi ASN	Kab. Gresik	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan mutasi jabatan pimpinan tinggi, mutasi jabatan administrasi, mutasi jabatan	4 Dok	170.032.796	

No	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target 2026	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target 2026	Kebutuhan Dana	
			pelaksanaan dan mutasi ASN antar daerah					pelaksanaan dan mutasi ASN antar daerah			
19	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kab. Gresik	Jumlah pengelolaan kenaikan pangkat ASN	28 Kali	551.612.926	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kab. Gresik	Jumlah pengelolaan kenaikan pangkat ASN	28 Kali	449.445.450	
20	Pengelolaan Promosi ASN	Kab. Gresik	Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN	5 Dok	1.326.883.933	Pengelolaan Promosi ASN	Kab. Gresik	Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN	5 Dok	421.518.788	
Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN					1.291.202.792	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN					2.450.943.990
21	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Kab. Gresik	Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya	5 Org	41.202.792	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Kab. Gresik	Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya	5 Org	44.710.000	
22	Pengelolaan Assessment Center	Kab. Gresik	Jumlah dokumen pengelolaan Assessment Center	1 Dok	500.000.000	Pengelolaan Assessment Center	Kab. Gresik	Jumlah dokumen pengelolaan Assessment Center	1 Dok	956.216.886	
23	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kab. Gresik	Jumlah dokumen hasil Pendidikan lanjutan ASN yang dikelola	1 Dok	500.000.000	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kab. Gresik	Jumlah dokumen hasil Pendidikan lanjutan ASN yang dikelola	1 Dok	71.868.800	
24	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Kab. Gresik	Jumlah Fungsional ASN yang dibina	1 Dok	250.000.000	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Kab. Gresik	Jumlah Fungsional ASN yang dibina	1 Dok	1.378.148.304	
Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					1.900.812.194	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					592.127.505
25	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Gresik	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	3 Dok	302.145.158	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Gresik	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	3 Dok	49.266.469	
26	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Kab. Gresik	Jumlah ASN yang diberikan penghargaan	1.400 Org	1.164.784.725	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Kab. Gresik	Jumlah ASN yang diberikan penghargaan	1.400 Org	423.674.996	

No	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target 2026	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target 2026	Kebutuhan Dana	
27	Pembinaan Disiplin ASN	Kab. Gresik	Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan disiplin	95 Org	363.995.227	Pembinaan Disiplin ASN	Kab. Gresik	Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan disiplin	95 Org	100.719.540	
28	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kab. Gresik	Jumlah laporan hasil pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	5 Lap	69.887.084	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kab. Gresik	Jumlah laporan hasil pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	5 Lap	18.466.500	
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				8.551.198.000	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				6.665.077.826	
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				8.551.198.000	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				6.665.077.826	
	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis				1.512.632.624	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis				1.391.838.241	
29	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kab. Gresik	Jumlah kebijakan teknis dan rencana pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren, perangkat daerah penunjang, dan urusan pemerintahan umum yang disusun	2 Kebijakan	1.512.632.624	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kab. Gresik	Jumlah kebijakan teknis dan rencana pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren, perangkat daerah penunjang, dan urusan pemerintahan umum yang disusun	2 Kebijakan	1.391.838.241	
	Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				7.038.565.376	Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				5.273.239.585	
30	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi	Kab. Gresik	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan	2 Lap	7.038.565.376	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi	Kab. Gresik	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan	2 Lap	5.273.239.585	

No	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target 2026	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target 2026	Kebutuhan Dana	
	Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan			Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan			



2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 merupakan suatu hasil kajian terhadap program/kegiatan/sub kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari perangkat daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada perangkat daerah provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi perangkat daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada perangkat daerah

BKPSDM sebagai salah satu instansi Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia berkewajiban juga menyusun Ranwal Renja Tahun 2026 yang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Renstra BKPSDM Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026.

Usulan program/kegiatan dari pemangku kepentingan diperoleh dari hasil musrenbangcam, musrenbangkab dan data internal BKPSDM. Adapun usulan tersebut dapat dilihat pada sebagai berikut:

Tabel 2 .4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Gresik

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sasaran pembangunan bidang aparatur Negara mengacu pada arah pembangunan bidang aparatur negara tahap keempat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2026 yaitu terwujudnya tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan netral. Sasaran tersebut didukung oleh ASN profesional, berintegritas, dan netral, pola hubungan kerja antar unit organisasi pemerintah, antara pemerintah dan masyarakat yang kolaboratif dan inklusif, organisasi birokrasi yang responsif dan adaptif, serta pelayanan publik yang berorientasi perbaikan sosial ekonomi berkelanjutan.

Sasaran pembangunan bidang aparatur Negara mencakup beberapa arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1. Terwujudnya aparatur sipil negara yang profesional dan berintegritas, dengan arah kebijakan memperkuat implementasi sistem merit dalam manajemen ASN dengan strategi meliputi:
 - a. Penguatan implementasi manajemen ASN dalam bentuk penguatan perencanaan kebutuhan ASN sesuai prioritas pembangunan nasional, pengembangan pola karir nasional, dan pelaksanaan manajemen ASN yang memperhatikan kekhususan daerah dan masyarakat. Peningkatan kualitas manajemen ASN melalui: (a) Rencana kebutuhan riil ASN jangka menengah, (b) Rencana pengembangan kompetensi ASN, dan (c) Penyusunan pola karir instansional;
 - b. Peningkatan efektivitas tata kelola instansi pemerintah melalui: (a) Penerapan proses bisnis instansi, (b) implementasi arsitektur SPBE instansi, dan (c) Penerapan e-Arsip terintegrasi;
 - c. Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui: (a) Penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan kinerja instansi,

- (b) Penerapan Zona Integritas untuk birokrasi yang bersih dan akuntabel, dan (c) Pemenuhan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa instansional;
 - d. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui: (a) Penerapan (menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan) Standar Pelayanan di Unit Pelayanan Publik (UPP) tertentu, (b) Percepatan penyelesaian pengaduan pelayanan public, (c) Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat di UPP tertentu, (d) Pelaksanaan FKP dalam penetapan standar pelayanan public, (e) Pemutakhiran informasi pada Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP), dan (f) Integrasi penyelenggaraan pelayanan pusat, daerah, dan BUMN/D
2. Terwujudnya arsitektur jaringan kerja pemerintahan yang kolaboratif dan inklusif, dengan arah kebijakan penataan proses bisnis internal instansi pemerintah, antar instansi pemerintah dan institusi pemerintah dengan non-pemerintah serta pelibatan masyarakat dalam perumusan dan implementasi kebijakan publik, dengan strategi meliputi:
- a. Penataan mekanisme ketatahubungan antar instansi pemerintah (pusat, pusat-daerah, daerah-daerah), intra institusi pemerintah dalam bentuk pemetaan mekanisme ketatahubungan antar instansi pemerintah (*Institutional Mapping*) dan penyusunan SOP strategis per dimensi pembangunan;
 - b. Penguatan mekanisme kerjasama dengan non-pemerintah dalam bentuk pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses penyusunan kebijakan pembangunan;
 - c. Pengarusutamaan kebijakan SPBE di seluruh K/L/Pemerintah Daerah.
3. Terwujudnya organisasi yang responsif dan adaptif, dengan arah kebijakan penataan organisasi pemerintah berbasis pada prioritas pembangunan nasional dengan strategi meliputi:

- a. Penataan organisasi pemerintah berbasis prioritas pembangunan nasional dalam bentuk restrukturisasi desain kelembagaan pemerintah pusat dan daerah (*structure follow strategy*);
 - b. Pengembangan sistem manajemen kinerja kelembagaan yang handal dan efektif, melalui penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan kinerja instansi serta penerapan zona integritas untuk birokrasi yang bersih dan akuntabel.
4. Terwujudnya pelayanan publik yang berorientasi pada perbaikan sosial ekonomi berkelanjutan, dengan arah kebijakan memperluas penerapan inovasi dalam pelayanan publik, dengan strategi meliputi:
- a. Pemanfaatan *Information and Communication Technologies* (ICT) dalam pelayanan publik dalam bentuk penguatan penerapan *e-services* dan pemenuhan standar pelayanan publik;
 - b. Pemanfaatan *Big Data* dalam pelayanan publik dalam bentuk optimalisasi pemanfaatan data bersama untuk memenuhi kebutuhan pelayanan publik;
 - c. Kerjasama multipihak dalam pelayanan publik yang berorientasi pada penyelesaian masalah masyarakat dalam bentuk pengembangan kerjasama pemerintah dan non pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik (*coproduction*);
 - d. Peningkatan kualitas pelayanan publik di Daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T) dalam bentuk perluasan pelayanan terpadu/terintegrasi;
 - e. Peningkatan kualitas kinerja dan pengawasan pelayanan publik dalam bentuk penguatan pengawasan kinerja pelayanan publik.

Terkait dengan reformasi birokrasi dan tata kelola, dalam RPJMN 2020-2024 menetapkan 4 (empat) arah kebijakan dan strategi reformasi birokrasi dan tata kelola, yakni:

1. Penguatan implementasi manajemen ASN, melalui: penerapan manajemen talenta nasional ASN, peningkatan sistem merit ASN, penyederhanaan eselonisasi, serta penataan jabatan fungsional;

2. Penataan kelembagaan dan proses bisnis, melalui: penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan SPBE terintegrasi;
3. Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui: perluasan implementasi sistem integritas, penguatan pengelolaan reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja organisasi, dan reformasi sistem perencanaan dan penganggaran;
4. Transformasi pelayanan publik, melalui: pelayanan public berbasis elektronik (*e-service*), penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik, penguatan ekosistem inovasi, dan penguatan pelayanan terpadu.

Selain itu di dalam agenda pembangunan ke-4 yaitu Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan disebutkan bahwa salah satu arah kebijakannya adalah Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter diantaranya melalui Revolusi Mental. Dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif, mencakup:

1. Peningkatan budaya kerja pelayanan publik yang ramah, cepat, efektif, efisien, dan terpercaya;
2. Penerapan disiplin, penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*) dalam birokrasi.

Pada Renstra Badan Kepegawaian Negara Tahun 2020-2024 dalam rangka mewujudkan visi dan misi bidang aparatur RPJMN diatas, menetapkan visi *"Mewujudkan Pengelola ASN yang Profesional dan Berintegritas untuk mendukung tercapainya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong"*.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, serta mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Badan Kepegawaian Negara dan penjabaran dari misi Memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan bidang aparatur sipil negara melalui pembinaan dan penyelenggaraan manajemen

ASN, serta pengembangan sistem informasi ASN berdasarkan sistem merit, maka terdapat 5 pilar yang menjadi misi Badan Kepegawaian Negara yakni meningkatkan kualitas ASN melalui:

1. Pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN;
2. Penyelenggaraan manajemen ASN;
3. Penyimpanan informasi pegawai ASN;
4. Pengawasan Dan Pengendalian Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen ASN;
5. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem manajemen internal BKN.

Terdapat dua nilai yang menjadi tujuan utama pembentukan karakter pegawai ASN, yaitu:

1. Profesional
 - a. BKN melaksanakan kewenangan, tugas dan fungsinya sesuai dengan yang telah dimanahkan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memaksimalkan sumber daya dalam pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen ASN secara efektif dan efisien, sebagai upaya untuk mewujudkan aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.
 - b. BKN melakukan upaya peningkatan kapabilitas dan kompetensinya sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam melakukan pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen ASN dan pelayanan kepegawaian.
2. Bermartabat
 - a. BKN melaksanakan kewenangan, fungsi dan tugas sesuai dengan koridor yang telah digaris melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. BKN berkomitmen untuk merumuskan dan mengimplementasikan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kepegawaian secara konsisten serta menjunjung tinggi etika dan nilai-nilai moral yang membentuk citra positif BKN.
- c. Menjaga integritas dan citra organisasi BKN sebagai lembaga pemerintah dalam pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen ASN dengan menjadi lembaga terdepan dalam menerapkan prinsip.

Sedangkan pada Renstra Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Tahun 2020-2024, dalam rangka penataan aparatur juga telah menetapkan visi *“Mewujudkan Aparatur Negara yang Profesional dan Berintegritas Tinggi untuk Mencapai Pemerintahan yang Berkelas Dunia dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan visi presiden dan wakil presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian yang berlandaskan Gotong Royong”*, dengan misi:

1. Menciptakan Kelembagaan dan Tata Kelola Birokrasi yang Ramping, Lincah, Terintegrasi dan Berbasis Elektronik.
2. Membangun SDM Aparatur yang Adaptif, Profesional, Kompetitif dan Berwawasan Global.
3. Mengembangkan Sistem Manajemen Kinerja Instansi Pemerintah yang Transparan dan Akuntabel.
4. Menciptakan Sistem Pengawasan yang Profesional, Independen dan Berintegritas.
5. Mewujudkan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel dan Melayani.
6. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Reformasi Birokrasi.

Adapun Sasaran Strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Tahun 2020-2024 dibidang kepegawaian adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis 2: Terwujudnya ASN yang profesional, berintegritas, dan sejahtera

yang dimaksud dengan terwujudnya ASN yang profesional, berintegritas, dan sejahtera yaitu menciptakan ASN yang mampu menunjukkan mutu atau kualitasnya dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya, memegang nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku dalam bekerja dan melayani publik. Untuk mendukung keprofesionalitasan dan integritas ASN maka perlu diberikan tingkat kesejahteraan yang cukup yang tidak hanya berupa kompensasi material namun juga non material. Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini akan dilihat dari:

1. Indeks Sistem Merit
2. Indeks Profesionalitas ASN

3.2 Tujuan dan Sasaran Ranwal Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran Ranwal Renja Tahun 2026 didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPSDM Kabupaten Gresik yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra BKPSDM Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026. Ranwal Renja Tahun 2026 merupakan penjabaran tahun ke lima dari Renstra 2021-2026.

3.3.1 Tujuan

Tujuan adalah merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi. Tujuan Ranwal Renja BKPSDM Kabupaten Gresik Tahun 2026 adalah dalam rangka untuk merealisasikan tujuan yang ada dalam Renstra BKPSDM Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026. Pada dasarnya tujuan BKPSDM Kabupaten Gresik sesuai dengan tujuan RPJMD Kabupaten nomor 1 yaitu:

“Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Gresik Baru yang Inovatif, Kolaboratif dan Cerdas Berdasarkan Good and Clean Governance”

Adapun indikator kinerja tujuan adalah:

Nilai Indeks Reformasi Birokrasi

Dalam mendukung tujuan Kabupaten di atas, BKPSDM Kabupaten Gresik pada Renstra Tahun 2021-2026 telah menetapkan tujuan:

“Mewujudkan Manajemen SDM Aparatur Berbasis Sistem Merit Berdasarkan Good dan Clean Governance”

Adapun tujuan Ranwal Renja BKPSDM Tahun 2026 adalah untuk mendukung terwujudnya tujuan Renstra dengan fokus pada tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Terwujudnya Penataan dan Promosi Sumber Daya Manusia Aparatur sesuai sistem merit;
2. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kepegawaian Berbasis *Online*;
3. Meningkatnya Disiplin dan Kinerja Pegawai;
4. Meningkatnya Kompetensi ASN sehingga dapat meningkatkan Indeks Profesionalitas ASN.

3.3.2 Sasaran

Berdasarkan penetapan sasaran BKPSDM yang tertuang pada Renstra Tahun 2021-2026, BKPSDM Kabupaten Gresik menetapkan sasaran dengan sebagai berikut:

“Meningkatnya Sistem Tata Kelola SDM Aparatur yang Profesional dan Berbasis Sistem Merit dalam rangka Memberikan Pelayanan Kepegawaian yang Berkualitas”

Dengan Indikator:

Indeks Profesionalitas ASN

Indeks Sistem Merit

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Pengukuran indeks diatur dalam Permenpan RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Dalam pelaksanaannya pengukuran dilakukan Badan Kepegawaian Negara dengan peraturan

Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Dalam pedoman tersebut diatur bobot pengukuran setiap dimensi sebagai berikut:

1. Dimensi Kualifikasi (25%) - mengukur kualifikasi Pendidikan formal dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah;
2. Dimensi Kompetensi (40%) - mengukur riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan;
3. Dimensi Kinerja (30%) - mengukur penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS;
4. Dimensi disiplin (5%)

Pengukuran dilakukan berdasarkan data yang bersumber dari Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK), hasil Pendataan Ulang PNS (e-PUPNS), Penilaian Prestasi Kerja PNS, dan data mengenai hukuman disiplin PNS. Namun demikian karena pada umumnya instansi pemerintah belum melakukan *updating* data pada aplikasi tersebut, maka untuk tahun 2019 pengukuran Indeks Profesionalitas ASN menggunakan data penilaian mandiri yang disampaikan oleh instansi pemerintah yang bersangkutan secara *offline*. Indeks Profesionalitas ASN Nasional dihitung rata-rata dari hasil pengukuran seluruh ASN.

Adapun Indeks Sistem Merit merupakan ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian penerapan sistem merit dalam manajemen SDM yang diukur dari 9 aspek yaitu: Perencanaan Kebutuhan; Pengadaan; Pengembangan Karier; Promosi dan Mutasi; Manajemen Kinerja; Penggajian, penghargaan dan disiplin; Perlindungan; dan Pelayanan Sistem Informasi. Pengukuran Indeks Sistem Merit berdasarkan pada Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit dalam Manajemen ASN di lingkungan Instansi Pemerintah.

Setiap Instansi Pemerintah diharuskan melakukan penilaian Mandiri melalui aplikasi SIPINTER (Sistem Informasi Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit) dengan mengupload dokumen-dokumen sesuai Sub Indikator pada indikator aspek yang telah ditentukan. KASN akan melakukan verifikasi terhadap kesesuaian dokumen tersebut.

Adapun kategori penilaian Sistem Merit adalah sebagai berikut:

1. Kategori IV, nilai 325 – 400, dengan indeks 0,81 – 1, dengan sebutan Sangat Baik;
2. Kategori III, nilai 250 – 324, dengan indeks 0,61 – 0,8, dengan sebutan Baik;
3. Kategori II, nilai 175 – 249, dengan indeks 0,41 – 0,6, dengan sebutan Kurang;
4. Kategori I, nilai 100 – 174, dengan indeks 0,2 – 0,4, dengan sebutan Buruk.

5.4 Program dan Kegiatan

Pada dasarnya program dan kegiatan merupakan upaya guna mengimplementasikan strategi dan kebijakan perangkat daerah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah direncanakan. Dengan kata lain bahwa program merupakan instrument dari suatu kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah atau merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program.

1. Faktor faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan yaitu:
 - a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah
 - b. Pencapaian SDGs
 - c. Pengentasan kemiskinan
 - d. Pencapaian NSPK dan SPM
 - e. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah
 - f. Pengembangan daerah terisolir

2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain:

BKPSDM Kabupaten Gresik Tahun 2026 merencanakan 3 Program, 11 kegiatan dan 27 sub kegiatan. Program yang dilaksanakan terdiri dari 1 Program yang bersifat rutin dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja pelayanan perangkat daerah dan 2 Program bersifat teknis yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi BKPSDM Kabupaten Gresik. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 5 Kegiatan dan 13 Sub Kegiatan:

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari 2 Sub Kegiatan:
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari 3 Sub Kegiatan:
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari 5 Sub Kegiatan:
 - a) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - b) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - c) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - e) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- 4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 1 Sub Kegiatan
 - a) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- B. Program Kepegawaian Daerah, terdiri dari 4 Kegiatan dan 11 Sub Kegiatan:
 - 1) Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN, terdiri dari 3 Sub Kegiatan:
 - a) Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
 - b) Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
 - c) Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - 2) Mutasi dan Promosi ASN, terdiri dari 3 Sub Kegiatan:
 - a) Pengelolaan Mutasi ASN
 - b) Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
 - c) Pengelolaan Promosi ASN
 - 3) Pengembangan Kompetensi ASN, terdiri dari 1 Sub Kegiatan:
 - a) Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
 - 4) Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, terdiri dari 4 Sub Kegiatan:
 - a) Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 - b) Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai
 - c) Pembinaan Disiplin ASN
 - d) Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
- C. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri dari 2 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan:

- 1) Pengembangan Kompetensi Teknis, terdiri dari 1 Sub Kegiatan:
 - a) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
- 2) Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, terdiri dari 2 Sub Kegiatan:
 - a) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
 - b) Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan

Adapun rencana program dan kegiatan dapat dilihat pada Tabel 2.7 sebagai berikut:

Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

Kabupaten Gresik

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5	URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				17.623.387.574				19.898.981.000
5.03	KEPEGAWAIAN				15.431.678.374				13.429.368.000
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA				12.088.267.902				10.558.415.000
5.03.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				75.223.598				111.365.537
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab. Gresik	6 Dok	29.758.500	APBD		6 Dok	36.325.410
5.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Gresik	12 Lap	45.465.098	APBD		12 Lap	75.040.127
5.03.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.051.941.674				7.552.208.275
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kab. Gresik	55 Pegawai	8.048.180.002	APBD		55 Pegawai	7.545.206.545
5.03.01.2.02.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan	Kab. Gresik	12 Lap	3.761.672	APBD		12 Lap	4.974.811

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		keuangan akhir tahun SKPD							
5.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD	Kab. Gresik	36 Lap	0	APBD		36 Lap	2.026.919
5.03.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				3.644.530.230				2.497.590.564
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Gresik	3 Paket	561.907.060	APBD		3 Paket	637.406.925
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Kab. Gresik	25 Paket	59.361.550	APBD		27 Paket	65.661.550
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kab. Gresik	13 Paket	105.132.200	APBD		13 Paket	117.775.476
5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Kab. Gresik	3 Dok	10.692.000	APBD		3 Dok	9.000.000
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Gresik	80 Lap	519.230.020	APBD		80 Lap	734.539.300
5.03.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen atas pelaksanaan SPBE	Kab. Gresik	1 Dok	2.388.207.400	APBD		1 Dok	933.207.313

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.03.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				114.648.000				175.134.000
5.03.01.2.08.04	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang dilaksanakan	Kab. Gresik	4 Lap	114.648.000	APBD		4 Lap	175.134.000
5.03.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				201.924.400				222.116.840
5.03.01.2.09.01	Penyediaan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kab. Gresik	11 Kendaraan	189.724.400	APBD		11 Kendaraan	208.696.624
5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kab. Gresik	90 Kali	12.200.000	APBD		95 Kali	13.420.000
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				3.343.410.472				2.870.953.000
5.03.02.2.01	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian Dan Informasi Kepegawaian ASN				535.148.100				720.074.000
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah dokumen hasil penyusunan rencana kebutuhan, jenis, dan jumlah jabatan untuk	Kab. Gresik	3 Dok	456.848.100	APBD		3 Dok	566.823.500

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		pelaksanaan pengadaan ASN							
5.03.02.2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga profesi ASN yang difasilitasi	Kab. Gresik	1 Lembaga	16.400.000	APBD		1 Lembaga	52.750.500
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kepegawaian	Kab. Gresik	2 Dok	61.900.000	APBD		2 Dok	100.500.000
5.03.02.2.02	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN				1.090.826.600				1.251.805.700
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan mutasi jabatan pimpinan tinggi, mutasi jabatan administrasi, mutasi jabatan pelaksana dan mutasi ASN antar daerah	Kab. Gresik	4 Dok	420.821.600	APBD		4 Dok	177.217.200
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah pengelolaan kenaikan pangkat ASN	Kab. Gresik	28 Kali	197.347.000	APBD		28 Kali	281.367.700
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN	Kab. Gresik	5 Dok	472.658.000	APBD		6 Dok	793.220.800
5.03.02.2.03	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN				1.362.276.400				773.899.786
5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya	Kab. Gresik	5 Org	34.750.000	APBD		5 Org	0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.03.02.2.03.02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah dokumen pengelolaan Assessment Center	Kab. Gresik	1 Dok	1.053.675.600	APBD		1 Dok	408.530.986
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah dokumen hasil Pendidikan lanjutan ASN yang dikelola	Kab. Gresik	1 Dok	145.350.800	APBD		1 Dok	178.168.800
5.03.02.2.03.13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Fungsional ASN yang dibina	Kab. Gresik	1 Dok	128.500.000	APBD		1 Dok	187.200.000
5.03.02.2.04	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				355.159.372				125.173.232
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Kab. Gresik	3 Dok	19.478.514	APBD		3 Dok	19.478.514
5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberikan penghargaan	Kab. Gresik	1.400 Org	303.756.300	APBD		1.400 Org	27.170.160
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan disiplin	Kab. Gresik	95 Org	24.303.343	APBD		95 Org	24.303.343
5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah laporan hasil pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	Kab. Gresik	5 Lap	7.621.215	APBD		5 Lap	7.621.215
5.03.02.2.04.0010	Evaluasi Pembinaan Disiplin	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	Kab, Gresik	-	0	APBD		19 Lap	46.600.000
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				2.191.709.200				6.469.613.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				2.191.709.200				6.469.613.000
5.04.02.2.01	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis				662.721.200				796.758.222
5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah kebijakan teknis dan rencana pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren, perangkat daerah penunjang, dan urusan pemerintahan umum yang disusun	Kab. Gresik	2 Kebijakan	662.721.200	APBD		2 Kebijakan	796.758.222
5.04.02.2.02	Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				1.528.988.000				5.672.854.778
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional,	Kab. Gresik	2 Lap	1.528.988.000	APBD		2 Lap	5.672.854.778

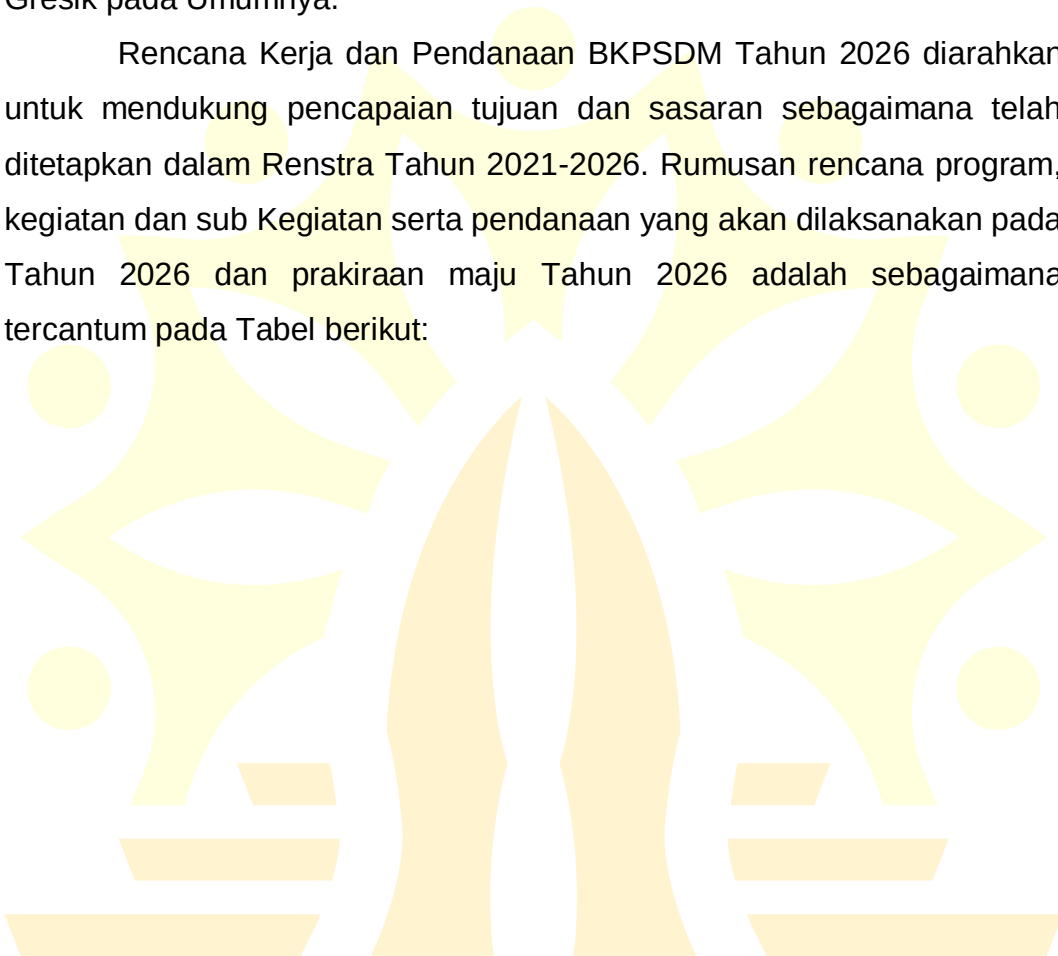
Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Kepemimpinan dan Prajabatan							

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan Pendanaan Tahun 2026 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Renstra BKPSDM serta untuk mendukung tercapainya tujuan BKPSDM pada khususnya dan Pemerintah Kabupaten Gresik pada Umumnya.

Rencana Kerja dan Pendanaan BKPSDM Tahun 2026 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2021-2026. Rumusan rencana program, kegiatan dan sub Kegiatan serta pendanaan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026 dan prakiraan maju Tahun 2026 adalah sebagaimana tercantum pada Tabel berikut:



Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2026 Kabupaten Gresik

No Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Anggaran	
					2026	2027
5	URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				17.623.387.574	19.898.981.000
5.03	KEPEGAWAIAN				15.431.678.374	13.429.368.000
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				12.088.267.902	10.558.415.000
5.03.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				75.223.598	111.365.537
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gresik	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 Dok	29.758.500	36.325.410
5.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gresik	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	12 Lap	45.465.098	75.040.127
5.03.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.051.941.674	7.552.208.275
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gresik	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	55 Pegawai	8.048.180.002	7.545.206.545
5.03.01.2.02.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Gresik	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	12 Lap	3.761.672	4.974.811
5.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Kab. Gresik	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD	36 Lap	0	2.026.919
5.03.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				3.644.530.230	2.497.590.564
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.761.672	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor	3 Paket	561.907.060	637.406.925
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Gresik	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	25 Paket	59.361.550	65.661.550
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Gresik	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	13 Paket	105.132.200	117.775.476
5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan	Kab. Gresik	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3 Dok	10.692.000	9.000.000
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gresik	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	80 Lap	519.230.020	734.539.300
5.03.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Gresik	Jumlah dokumen atas pelaksanaan SPBE	1 Dok	2.388.207.400	933.207.313
5.03.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				114.648.000	175.134.000

No Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Anggaran	
					2026	2027
5.03.01.2.08.04	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Gresik	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang dilaksanakan	4 Lap	114.648.000	175.134.000
5.03.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				201.924.400	222.116.840
5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Gresik	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	11 Kendaraan	189.724.400	208.696.624
5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Gresik	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	90 Kali	12.200.000	13.420.000
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				3.343.410.472	2.870.953.000
5.03.02.2.01	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian Dan Informasi Kepegawaian ASN				535.148.100	720.074.000
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kab. Gresik	Jumlah dokumen hasil penyusunan rencana kebutuhan, jenis, dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	3 Dok	456.848.100	566.823.500
5.03.02.2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Kab. Gresik	Jumlah Lembaga profesi ASN yang difasilitasi	1 Lembaga	16.400.000	52.750.500
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Gresik	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kepegawaian	2 Dok	61.900.000	100.500.000
5.03.02.2.02	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN				1.090.826.600	1.251.805.700
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Kab. Gresik	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan mutasi jabatan pimpinan tinggi, mutasi jabatan administrasi, mutasi jabatan pelaksanaan dan mutasi ASN antar daerah	4 Dok	420.821.600	177.217.200
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kab. Gresik	Jumlah pengelolaan kenaikan pangkat ASN	28 Kali	197.347.000	281.367.700
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Kab. Gresik	Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN	5 Dok	472.658.000	793.220.800
5.03.02.2.03	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN				1.362.276.400	773.899.786
5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Kab. Gresik	Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya	5 Org	34.750.000	0
5.03.02.2.03.02	Pengelolaan Assessment Center	Kab. Gresik	Jumlah dokumen pengelolaan Assessment Center	1 Dok	1.053.675.600	408.530.986
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kab. Gresik	Jumlah dokumen hasil Pendidikan lanjutan ASN yang dikelola	1 Dok	145.350.800	178.168.800

No Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Anggaran	
					2026	2027
5.03.02.2.03.13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Kab. Gresik	Jumlah Fungsional ASN yang dibina	1 Dok	128.500.000	187.200.000
5.03.02.2.04	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				355.159.372	125.173.232
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Gresik	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	3 Dok	19.478.514	19.478.514
5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Kab. Gresik	Jumlah ASN yang diberikan penghargaan	1.400 Org	303.756.300	27.170.160
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Kab. Gresik	Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan disiplin	95 Org	24.303.343	24.303.343
5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kab. Gresik	Jumlah laporan hasil pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	5 Lap	7.621.215	7.621.215
5.03.02.2.04.0010	Evaluasi Pembinaan Disiplin	Kab. Gresik	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	19 Lap	0	46.600.000
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				2.191.709.200	6.469.613.000
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				2.191.709.200	6.469.613.000
5.04.02.2.01	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis				662.721.200	796.758.222
5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kab. Gresik	Jumlah kebijakan teknis dan rencana pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren, perangkat daerah penunjang, dan urusan pemerintahan umum yang disusun	2 Kebijakan	662.721.200	796.758.222
5.04.02.2.02	Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				1.528.988.000	5.672.854.778
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kab. Gresik	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	2 Lap	1.528.988.000	5.672.854.778

BAB V PENUTUP

Sebagai kesimpulan pada Bab Penutup Ranwal Renja BKPSDM Kabupaten Gresik Tahun 2026 ini, terdapat beberapa catatan penting yang perlu mendapat perhatian khususnya kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut dengan penjelasan sebagai berikut:

5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

1. Dengan ditetapkannya Ranwal Renja BKPSDM Kabupaten Gresik Tahun 2026 ini, selanjutnya akan dijadikan bahan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2026 yang pembahasannya dilaksanakan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten;
2. Dengan ditetapkannya Ranwal Renja BKPSDM Kabupaten Gresik Tahun 2026 ini, akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BKPSDM Tahun 2026 melalui Rapat Forum SKPD, sehingga nantinya bisa ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BKPSDM Kabupaten Gresik Tahun 2026;
3. Dengan ditetapkannya Ranwal Renja BKPSDM Kabupaten Gresik Tahun 2026 ini, maka semua pihak dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) di lingkungan BKPSDM Kabupaten Gresik dapat mempelajari untuk selanjutnya dijadikan acuan dan arahan operasionalisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2026.

5.2 Rencana Tindak Lanjut

1. Renja BKPSDM Kabupaten Gresik Tahun 2026 akan dijadikan dasar penyusunan Ranwal Renja Tahun 2027 dan salah satu bahan pengukuran dan evaluasi kinerja serta menjadi dasar laporan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Tahun 2027;

2. Ranwal Renja BKPSDM Kabupaten Gresik Tahun 2026 diharapkan dapat membangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi untuk konsisten dalam perencanaan pembangunan untuk kebaikan bersama.





BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK
NOMOR : 050/1379/HK/437.12/2024
TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2026

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keselarasan pembangunan secara efektif, efisien, dan bersasaran, diperlukan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Renja Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;



12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Bupati Gresik Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik;
14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 75 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Menugaskan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI GRESIK,

FANDI AKHMAD YANI



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 050/ ~~1379~~ /HK/437.12/2024

TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN GRESIK TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2026

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
1.	Ketua	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik.	a. bertanggungjawab terhadap aktifitas dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusun Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik Tahun 2026; dan b. memberikan arahan dan petunjuk kepada tim dalam penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik Tahun 2026.
2.	Sekretaris	Sekretaris pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik.	a. mengkoordinasi dan memfasilitasi serta mengawasi dan memantau keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Kelompok Kerja Renja Tahun 2026;



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
			b. membantu Ketua Tim dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja-PD) Tahun 2026; dan c. mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan Tim penyusun Rencana Kerja (Renja-PD) Tahun 2026 kepada Ketua Tim.
3.	Kelompok Kerja I Perumusan Rencana Kerja Bidang Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Kompetensi Aparatur a. Ketua	Kepala Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik.	a) melakukan <i>review</i> hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun lalu lingkup Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi; b) melakukan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi; c) melakukan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi lingkup Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi;



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
	b. Anggota	1) Dani Puspasari, S.Sos., M.Si., Analisis Kepegawaian Ahli Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik; dan 2) Erna Mufidatul Husna, S.AP., Analisis Kepegawaian Ahli Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik.	d) melakukan <i>review</i> terhadap Rancangan Awal RKPD lingkup Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi; e) melakukan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat lingkup Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi; dan f) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 beserta kerangka pendanaan Bidang Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Kompetensi Aparatur.
4.	Kelompok Kerja II Perumusan Rencana Kerja Bidang Pengadaan, Informasi, dan Fasilitasi Profesi ASN a. Ketua	Kepala Bidang Pengadaan, Informasi, dan Fasilitasi Profesi ASN pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik.	a) melakukan <i>review</i> hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun lalu lingkup Bidang Pengadaan, Informasi, dan Fasilitasi Profesi ASN; b) melakukan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Bidang Pengadaan, Informasi, dan Fasilitasi Profesi ASN;



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
	b. Anggota	1) Evita Purwandari, S.E., M.Si., Analis Kepegawaian Ahli Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik; 2) Ali Miftach, A.Md., Analis Kepegawaian Ahli Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik; dan 3) Fatikha Amara Sari, S.T., Analis Kepegawaian Ahli Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik.	c) melakukan telahaan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi lingkup Bidang Pengadaan, Informasi, dan Fasilitasi Profesi ASN; d) melakukan <i>review</i> terhadap Rancangan Awal RKPD lingkup Bidang Pengadaan, Informasi, dan Fasilitasi Profesi ASN; e) melakukan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat lingkup Bidang Pengadaan, Informasi, dan Fasilitasi Profesi ASN; dan f) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 beserta kerangka pendanaan Bidang Pengadaan, Informasi, dan Fasilitasi Profesi ASN.
5.	Kelompok Kerja III Perumusan Rencana Kerja Bidang Mutasi dan Kepangkatan		



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
	a. Ketua b. Anggota	Kepala Bidang Mutasi dan Kepangkatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik. 1) Ira Kusumaningsih, S.Sos., Analisis Kepegawaian Ahli Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik; dan 2) Fitriyah Indah Laili, S.E., Analisis Kepegawaian Ahli Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik.	a) melakukan <i>review</i> hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun lalu lingkup Mutasi dan Kepangkatan; b) melakukan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Mutasi dan Kepangkatan; c) melakukan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi lingkup Mutasi dan Kepangkatan; d) melakukan <i>review</i> terhadap Rancangan Awal RKPD lingkup Mutasi dan Kepangkatan; e) melakukan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat lingkup Mutasi dan Kepangkatan; dan f) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 beserta kerangka pendanaan Mutasi dan Kepangkatan.
6.	Kelompok Kerja IV Perumusan Rencana Kerja Bidang Pembinaan Disiplin, Penilaian Kinerja, dan Kesejahteraan		



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
	a. Ketua	Kepala Bidang Pembinaan Disiplin, Penilaian Kinerja dan Kesejahteraan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik.	a) melakukan <i>review</i> hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun lalu lingkup Bidang Pembinaan Disiplin, Penilaian Kinerja dan Kesejahteraan;
	b. Anggota	1) Hasriani, S.STP., M.Si., Analis Kepegawaian Ahli Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik; dan 2) Muhammad Awwalu Baqis Shofi, S.STP., Analis Kepegawaian Ahli Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik.	b) melakukan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Bidang Pembinaan Disiplin, Penilaian Kinerja dan Kesejahteraan; c) melakukan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bidang Pembinaan Disiplin, Penilaian Kinerja dan Kesejahteraan; d) melakukan <i>review</i> terhadap Rancangan Awal RKPD lingkup Bidang Pembinaan Disiplin, Penilaian Kinerja dan Kesejahteraan; e) melakukan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat lingkup Bidang Pembinaan Disiplin, Penilaian Kinerja dan Kesejahteraan; dan f) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 beserta kerangka pendanaan lingkup Bidang Pembinaan Disiplin, Penilaian Kinerja dan Kesejahteraan.



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
7.	Kelompok Kerja V Perumusan Rencana Kerja Lintas Sektoral a. Ketua b. Anggota	Perencana Ahli Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik. 1) Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik; dan 2) Pengelola Program dan Laporan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik.	a) melakukan <i>review</i> hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun lalu lingkup Lintas Sektoral; b) melakukan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Lintas Sektoral; c) melakukan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Lintas Sektoral; d) melakukan <i>review</i> terhadap Rancangan Awal RKPD lingkup Lintas Sektoral; e) melakukan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat lingkup Lintas Sektoral; dan f) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 beserta kerangka pendanaan lingkup Lintas Sektoral.



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
8.	Kelompok Kerja VI Perumusan Rencana Kerja Sekretariat a. Ketua b. Anggota	Perencana Ahli Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik. 1) Kepala Sub Bagian Keuangan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik; dan 2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik.	a) melakukan <i>review</i> hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun lalu lingkup Sekretariat; b) melakukan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Sekretariat; c) melakukan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat; d) melakukan <i>review</i> terhadap Rancangan Awal RKPD lingkup Sekretariat; e) melakukan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat lingkup Sekretariat; dan f) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 beserta kerangka pendanaan lingkup Sekretariat.



BUPATI GRESIK,

FANDI AKHMAD YANI